



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SENFRY OKTOVIANUS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 206942

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.670.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/288 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 710.000.000
4. Tanah Seluas 24.980 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 153.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 104.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 180.906.726

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.107.906.726
III. HUTANG	Rp.	113.268.288
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.994.638.438

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.